



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 85 TAHUN 2022**

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Wali Kota perlu menetapkan Kode Klasifikasi Arsip;

b. bahwa pengaturan mengenai Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan keseragaman dalam pengelolaan arsip dinamis;
- b. mensinkronisasikan informasi kearsipan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Medan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar Penomoran Surat, Pemberkasan, Penataan, Penyusutan, dan Penemuan Kembali Arsip.

- (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Medan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan.

Pasal 5

- (1) Setiap Arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan kode klasifikasi berdasarkan fungsi, kegiatan dan transaksinya.
- (2) Penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Pemberkasan, Pembuatan Daftar Arsip Aktif, Inaktif, Statis, dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Pindah, Usul Serah, dan Usul Musnah.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 28 November 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 28 November 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
000 UMUM				
000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
	000.1.1	Telekomunikasi		
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah		
	000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD		
	000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai		
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri		
	000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah		
	000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD		
	000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai		
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan,		
	000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)		
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi		
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas		
	000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas		
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan		
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan		
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor		
	000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape		
	000.1.8.2	Penhijauan		
	000.1.8.3	Perbaikan Gedung		
	000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor		
	000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma		
	000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman		
	000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer		
	000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan		
	000.1.9.2	Pemasangan		
	000.1.10	Ketertiban dan Keamanan		
	000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas		
	000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan		
	000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir		
	000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya		
000.2 PERLENGKAPAN				
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan		
	000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan		
	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan		
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor		
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor		
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor		
	000.2.3	Distribusi		
	000.2.3.1	Barang habis pakai		
	000.2.3.2	Barang milik daerah		
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan		
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah		
000.3 PENGADAAN				
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa,		
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,		
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan		
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)		
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan		
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)		
000.4 PERPUSTAKAAN				
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka		
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman		
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional		
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog		
	000.4.3	Koleksi Pustaka		
	000.4.3.1	Pembelian		
	000.4.3.2	Hibah		
	000.4.3.3	Hadiah		
	000.4.3.4	Tukar Menukar		
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR		
	000.4.3.6	Terbitan Internal		
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	
	000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka	
	000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi	
	000.4.6		Layanan Perpustakaan	
		000.4.6.1	Keanggotaan	
		000.4.6.2	Peminjaman	
		000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	
	000.4.7		Kerjasama Perpustakaan	
		000.4.7.1	MoU	
		000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	
		000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	
	000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
		000.4.8.1	Pengembangan situs web	
		000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	
		000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	
		000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital	
	000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
	000.4.10		Konservasi	
		000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	
		000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	
		000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	
	000.4.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
	000.4.12		Transformasi Digital	
	000.4.13		Kurasi Digital	
	000.4.14		Pengembangan Perpustakaan	
		000.4.14.1	Perpustakaan Umum	
		000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	
		000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	
		000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	
000.5 KEARSIPAN				
	000.5.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	000.5.2		Pembinaan Kearsipan	
		000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan	
		000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	
		000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	
		000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan,	
		000.5.2.5	Data Base Arsiparis	
		000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	
		000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi	
		000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	
		000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana	
		000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan	
		000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari	
	000.5.3		Pengelolaan Arsip Dinamis	
		000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu	
		000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)	
		000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)	
		000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan	
		000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli,	
	000.5.4		Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital,	
	000.5.5		Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi	
	000.5.6		Penyusutan Arsip	
		000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	
		000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia	
		000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat	
	000.5.7		Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih	
	000.5.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	
		000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	
		000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	
	000.5.9		Pengelolaan Arsip Statis	
		000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan	
		000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	
		000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan,	
		000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	
		000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis,	
		000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih	
		000.5.9.7	Preservasi Kuratif	
		000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian,	
		000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	
	000.5.10		Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan,	
	000.5.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN	
	000.5.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	
	000.5.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	
	000.5.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	
	000.5.15		Pengawasan Kearsipan	
		000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		000.5.15.2		Pengawasan Kearsipan Eksternal
		000.5.15.3		Sanksi
000.6 PERSANDIAN				
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	000.6.2	Pengamanan persandian		
		000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	
		000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	
		000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi		
		000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	
		000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	
		000.6.3.3	Pelaksanaan	
		000.6.3.4	Pelaporan	
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian		
		000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	
		000.6.4.2	Jaring Komunikasi	
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik		
		000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	
		000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	
		000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	
		000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	
		000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	
		000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	
		000.6.5.7	Pelaporan	
000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang		
		000.7.1.1	Musrenbang Kab/Kota	
		000.7.1.2	Musrenbang Kecamatan	
		000.7.1.3	Musrenbang Kelurahan	
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah		
		000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	
		000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
		000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	
		000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	
		000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
		000.7.2.6	Program kerja tahunan	
		000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	
		000.7.2.8	Laporan Berkala	
		000.7.2.9	Laporan Insidental	
		000.7.2.10	Evaluasi Program	
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan		
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah		
		000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	
		000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	
		000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	
		000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan		
		000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	
		000.7.7.2	Pendanaan Daerah	
		000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	
		000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	
		000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	
000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
		000.8.1.1	Pembentukan	
		000.8.1.2	Penggubahan	
		000.8.1.3	Pembubaran	
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja		
		000.8.2.1	Analisa Jabatan	
		000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	
	000.8.3	Ketatalaksanaan		
		000.8.3.1	Proses Bisnis	
		000.8.3.2	Standar Pelayanan	
		000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	
		000.8.3.4	Pelayanan Publik	
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional		
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan		
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi		
		000.8.6.1	Budaya Kerja	
		000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	
		000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN				
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah		
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan,		
	000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan		
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan		
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.6.1	Data		
	000.9.6.2	Statistik		
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian		
	000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		
	000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		
	000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop		
100 PEMERINTAHAN				
100.1 OTONOMI DAERAH				
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)		
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi		
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		
	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah		
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
	100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang		
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)		
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah		
	100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		
	100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah		
	100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		
100.2 PEMERINTAHAN UMUM				
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama		
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi		
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas		
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama		
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan		
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum		
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah		
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara		
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah		
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan		
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah		
100.3 HUKUM				
	100.3.1	Program Legislasi		
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah		
	100.3.1.2	Program Legislasi		
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah		
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah		
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Walikota		
	100.3.3.2	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi		
	100.3.3.3	Keputusan Sekretaris Daerah Kota		
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran		
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Kota		
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II		
	100.3.5	Surat Perintah		
	100.3.5.1	Surat Perintah Walikota		
	100.3.5.2	Surat Perintah Setingkat Eselon II		
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis		
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama		
	100.3.7.1	Dalam Negeri		
	100.3.7.2	Luar Negeri		
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan		
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum		
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata		
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum		
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran		
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata		
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara		
	100.3.11.4	Perburuhan		
	100.3.11.5	Arbitrase		
	100.3.11.6	Sengketa Adat		

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		100.3.12	Perijinan	
		100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		100.3.13.1	Hak Cipta	
		100.3.13.2	Hak Paten	
		100.3.13.3	Hak Desain Industri	
		100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	
		100.3.13.5	Hak Merk	
		100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak□	
200 POLITIK				
200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	
		200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	
		200.1.2.3	Bela Negara	
		200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	
		200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	
		200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
		200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	
		200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	
		200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	
		200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	
		200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	
		200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
		200.1.4.1	Ketahanan Seni	
		200.1.4.2	Ketahanan Budaya	
		200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	
		200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	
		200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	
		200.1.4.6	Fasilitasi	
		200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	
		200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	
		200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	
		200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	
		200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	
		200.1.5	Politik Dalam Negeri	
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah	
		200.1.5.7	Database Parpol	
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	
		200.1.5.9	Pemilihan Umum	
		200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	
200.2 PEMILU				
		200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
		200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	
		200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	
		200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	
		200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual	
		200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	
		200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD	
		200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	
		200.2.5	Pencalonan Pemilu	
		200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	
		200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	
		200.2.5.3	Daftar bakal calon	
		200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	
		200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		200.2.5.6		Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.6			Kampanye Pemilu
		200.2.6.1		Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
		200.2.6.2		Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
		200.2.6.3		Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
	200.2.7			Dana Kampanye
		200.2.7.1		Pedoman audit dana kampanye
		200.2.7.2		Laporan dana kampanye peserta Pemilu
		200.2.7.3		Laporan hasil audit dana kampanye
	200.2.8			Pemungutan dan Penghitungan Suara
		200.2.8.1		Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
		200.2.8.2		Master surat suara
		200.2.8.3		Surat suara yang terpakai
		200.2.8.4		Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
		200.2.8.5		Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
	200.2.9			Penetapan Hasil Pemilu
	200.2.10			Perselisihan Hasil Pemilu
		200.2.10.1		Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
		200.2.10.2		Jawaban dan kesimpulan termohon
		200.2.10.3		Salinan Putusan lembaga peradilan
	200.2.11			Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	300.1.1			Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
	300.1.2			Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
		300.1.2.1		Tata Operasional Polisi Pamong Praja
		300.1.2.2		Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
	300.1.3			Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
	300.1.4			Perlindungan Masyarakat
	300.1.5			Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	300.1.6			Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN				
	300.2.1			Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	300.2.2			Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
		300.2.2.1		Rencana dan standarisasi dan pengawakan dan perbekalan
		300.2.2.2		Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
		300.2.2.3		Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
		300.2.2.4		Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
		300.2.2.5		Perencanaan dan standarisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
		300.2.2.6		Registrasi BEACON
	300.2.3			Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	300.2.4			Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5			Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
		300.2.5.1		Rencana Pendidikan dan Pelatihan
		300.2.5.2		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.3		Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		300.2.5.4		Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
		300.2.5.5		Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6			Operasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.7			Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
	300.2.8			Operasi Komunikasi
		300.2.8.1		Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
		300.2.8.2		Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
		300.2.8.3		Registrasi BEACON
	300.2.9			Inventarisasi dan Pemeliharaan
	300.2.10			Pengembangan Sistem Informasi
	300.2.11			Penyajian dan Layanan Informasi
	300.2.12			Pelaporan dan Evaluasi
		300.2.12.1		Laporan Harian
		300.2.12.2		Laporan Bulanan
		300.2.12.3		Laporan Tahunan
		300.2.12.4		Evaluasi
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT				
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	400.1.1			Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.1.2			Pembangunan Sumber Daya
		400.1.2.1		Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.2		Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.3		Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.4		Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
		400.1.2.5		Fasilitasi Teknologi dan inovasi
		400.1.2.6		Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
		400.1.2.7		Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3			Peningkatan Infrastruktur

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.1.3.1	Fasilitas Transportasi peningkatan infrastruktur
			400.1.3.2	Fasilitas Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.3	Fasilitas Sosial dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.4	Fasilitas Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.5	Fasilitas energi dalam peningkatan infrastruktur
			400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
			400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4			Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
			400.1.4.1	Fasilitas Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.2	Fasilitas Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.3	Fasilitas Usaha mikro, kecil dan menengah
			400.1.4.4	Fasilitas Kemitraan usaha
			400.1.4.5	Fasilitas Pengembangan komoditas unggulan
			400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
			400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
			400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.9	Fasilitas pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.12	Fasilitas pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
			400.1.4.14	Fasilitas Kerja Sama antar Desa
	400.1.5			Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
			400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.6			Pengembangan Daerah Khusus
			400.1.6.1	Fasilitas pengembangan Daerah perbatasan
			400.1.6.2	Fasilitas pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
			400.1.6.3	Fasilitas pengembangan Daerah Perdesaan
			400.1.6.4	Fasilitas pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
			400.1.6.5	Fasilitas pengembangan Wilayah strategis
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	400.2.1			Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah
	400.2.2			Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
			400.2.2.1	Data gender
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitas
	400.2.3			Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitas
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
			400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
			400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4			Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
			400.2.4.2	Data perlindungan anak
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitas
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
	400.2.5			Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur,
			400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
			400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
			400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
			400.2.5.4	Advokasi dan fasilitas
			400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
			400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
	400.2.6			Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
	400.2.7			Penghargaan Kabupaten Layak Anak
	400.2.8			Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3 PENDIDIKAN				
	400.3.1			Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.3.2			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
			400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
			400.3.2.2	Pelatihan Sosial
			400.3.2.3	Peringatan Hari anak
			400.3.2.4	Block Grant
	400.3.3			Pendidikan Masyarakat

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
			400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
			400.3.3.3	Pembinaan Program
			400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
			400.3.3.5	Pameran
			400.3.3.6	Rakor
			400.3.3.7	Sosialisasi
			400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
		400.3.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
		400.3.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
			400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
			400.3.5.2	Block Grant
			400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
			400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
			400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
			400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
		400.3.6		Pendidikan khusus/Layanan Khusus
			400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
			400.3.6.2	Block Grant
			400.3.6.3	Lomba, festival
			400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.6.5	Pendataan
			400.3.6.6	Kelembagaan
		400.3.7		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
			400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.7.3	Sertifikasi Guru
			400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
			400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
			400.3.7.7	Block Grant
		400.3.8		Sekolah Menengah Atas
			400.3.8.1	Kurikulum
			400.3.8.2	Bahan Ajar
			400.3.8.3	Pelatihan
			400.3.8.4	Block grant
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
			400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
		400.3.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
			400.3.9.1	Bahan ajar
			400.3.9.2	Petunjuk Teknis
			400.3.9.3	Block grant
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
			400.3.9.8	Pendataan
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
		400.3.10		Pendidik dan Tenaga Pendidik
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.10.3	Sertifikasi Guru
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
			400.3.10.7	Block grant
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.11		Penilaian Pendidikan
			400.3.11.1	Penilaian Akademik
			400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
			400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
		400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
		400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4 KEOLAHRAGAAN				
			400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
		400.4.3.1	Olahraga Massal	
		400.4.3.2	Olahraga Tradisional	
		400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	
		400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	
		400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	
		400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	
		400.4.4.3	Olahraga Prestasi	
		400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	
		400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
		400.4.5.1	Olahraga Tradisional	
		400.4.5.2	Layanan Khusus	
		400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
		400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	
		400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	
		400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
		400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	
		400.4.7.2	Kompetisi	
		400.4.7.3	IPTEK Olahraga	
		400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
		400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	
		400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	
		400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
		400.4.9.1	Industri Olahraga	
		400.4.9.2	Promosi Olahraga	
		400.4.10	Olahraga Prestasi	
		400.4.10.1	Daerah	
		400.4.10.2	Nasional	
		400.4.10.3	Internasional	
		400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
		400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	
		400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	
		400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	
400.5 KEPEMUDAAN				
		400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	
		400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	
		400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	
		400.5.2.3	Pengembangan	
		400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda	
		400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	
		400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	
		400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	
		400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda	
		400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	
		400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	
		400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	
		400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	
		400.5.5.1	Pengkajian	
		400.5.5.2	Pengembangan	
		400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	
		400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
		400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	
		400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	
		400.5.7	Kewirausahaan	
		400.5.7.1	Kelembagaan	
		400.5.7.2	Pengaderan	
		400.5.7.3	Perintisan	
		400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
		400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	
		400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	
		400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
		400.5.9.1	Standardisasi	
		400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	
		400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
		400.5.10.1	Kemitraan	
		400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	
400.6 KEBUDAYAAN				
		400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
		400.6.2.1	Registrasi Nasional	
		400.6.2.2	Pelindungan	
		400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	
	400.6.3		Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
		400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	
		400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	
		400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	
		400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	
	400.6.4		Sejarah dan Nilai Budaya	
		400.6.4.1	Sejarah	
		400.6.4.2	Pemetaan nilai	
		400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	
		400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	
		400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	
		400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	
	400.6.5		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
		400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	
		400.6.5.2	Kekayaan budaya	
		400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	
		400.6.5.4	Diplomasi budaya	
400.7 KESEHATAN				
	400.7.1		Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.7.2		Upaya Kesehatan Dasar	
		400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	
		400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	
		400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	
		400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	
		400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	
		400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	
		400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	
		400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	
		400.7.2.9	Pembiayaan darah	
		400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	
		400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	
		400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	
		400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	
		400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	
	400.7.3		Upaya Kesehatan Rujukan	
		400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	
		400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	
		400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	
		400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	
		400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	
		400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	
		400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	
		400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	
		400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	
		400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	
	400.7.4		Keperawatan dan keteknisian medik	
		400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	
		400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	
		400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	
		400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	
		400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	
	400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan	
		400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	
		400.7.5.2	Patologi dan toksilogi	
		400.7.5.3	Radiologi	
		400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	
		400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	
		400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	
		400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	
	400.7.6		Kesehatan Jiwa	
		400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	
		400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	
		400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	
		400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	
		400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	
		400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	
	400.7.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
		400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	
		400.7.7.2	Imunisasi	
		400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	
		400.7.7.4	Kesehatan matra	
	400.7.8		Pengendalian penyakit menular langsung	
		400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	
		400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	
		400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	
		400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	
	400.7.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang	
		400.7.9.1	Pengendalian malaria	
		400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	
		400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	
		400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	
	400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular	
		400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	
		400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	
		400.7.10.3	Penyakit kanker	
		400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	
		400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	
	400.7.11		Penyehatan lingkungan	
		400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	
		400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	
		400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	
		400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	
		400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	
	400.7.12		Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian	
	400.7.13		Gizi	
		400.7.13.1	Gizi makro	
		400.7.13.2	Gizi mikro	
		400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	
		400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	
		400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	
	400.7.14		Kesehatan ibu	
		400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	
		400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	
		400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	
		400.7.14.4	Keluarga berencana	
		400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	
	400.7.15		Kesehatan anak	
		400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	
		400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	
		400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	
		400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	
		400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	
	400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
		400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	
		400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	
		400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	
		400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	
	400.7.17		Kesehatan kerja dan Olah raga	
		400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	
		400.7.17.2	Kapasitas kerja	
		400.7.17.3	Lingkungan kerja	
		400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	
		400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	
		400.7.17.6	Kesehatan olahraga	
	400.7.18		Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
		400.7.18.1	Harga obat publik	
		400.7.18.2	Pengadaan obat	
		400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	
	400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan	
		400.7.19.1	Alat kesehatan	
		400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	
		400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	
	400.7.20		Kefarmasian	
		400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	
		400.7.20.2	Farmasi klinis	
		400.7.20.3	Farmasi Komunitas	
		400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	
	400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian	
		400.7.21.1	Obat tradisional	
		400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	
		400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	
		400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	
	400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
		400.7.22.1	Surat keterangan	
		400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	
	400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan	
		400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	
		400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	
		400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	
		400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	
		400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
		400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	
		400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	
		400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
		400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	
		400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	
		400.7.26	Kesehatan Haji	
		400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	
		400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	
		400.7.27	Promosi Kesehatan	
		400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	
		400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	
		400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	
		400.7.27.4	Hari kesehatan	
		400.7.28	Data dan Informasi	
		400.7.28.1	Statistik kesehatan	
		400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	
		400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	
		400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
		400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	
		400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
		400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	
		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	
		400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
		400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	
		400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	
		400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	
		400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	
		400.7.31	Rekam Medis	
400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
		400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.8.2	Fasilitasi	
		400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	
		400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan	
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	
		400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
		400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	
		400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	
		400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	
400.9 SOSIAL				
		400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
		400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	
		400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	
		400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	
		400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	
		400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	
		400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
		400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra	
		400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social	
		400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	
		400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
		400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	
		400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	
		400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	
		400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	
		400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
		400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
		400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	
		400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	
		400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	
		400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
		400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
		400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	
		400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	
		400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	
		400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	
		400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
		400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	
		400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	
		400.9.10.4	Kerjasama	
	400.9.11	Jaminan Sosial		
		400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	
		400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	
		400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	
		400.9.11.4	Kerjasama	
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial		
		400.9.12.1	Ketahanan keluarga	
		400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	
		400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	
		400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	
		400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil		
		400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	
		400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	
		400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	
		400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	
		400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan		
		400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	
		400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	
		400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	
		400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	
		400.9.14.5	Bantuan Langsung	
		400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial		
		400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	
		400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	
		400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	
		400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	
400.1(1) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.10.2	Pemerintahan Kelurahan		
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Kelurahan	
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Kelurahan	
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan	
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kelurahan	
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Kelurahan	
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Kelurahan	
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	
	400.10.4	Pemberdayaaan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		400.10.4.1	Budaya Nusantara	
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Kelurahan	
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat		
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	
		400.10.5.5	Ekonomi Kelurahan dan Masyarakat Tertinggal	
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan		
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Kelurahan	
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Kelurahan	
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kelurahan	
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Kelurahan	
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Kelurahan	
	400.10.7	Badan Usaha Milik Kelurahan		
400.1 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN				
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	400.11.2	Pertamanan		
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	
		400.11.2.2	Taman Kota	
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	
	400.11.3	Pemakaman		
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	
		400.11.3.2	Pemakaman	
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		400.11.4	Jalur Hijau	
			400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau	
			400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan	
			400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	
		400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
		400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
		400.11.7	Pengelolaan Data	
		400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
400.1: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
		400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
		400.12.2	Pendaftaran Penduduk	
			400.12.2.1 Identitas Penduduk	
			400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	
			400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara	
			400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan	
			400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
		400.12.3	Pencatatan Sipil	
			400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian	
			400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian	
			400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	
			400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan	
			400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
		400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
			400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	
			400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	
			400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	
		400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
			400.12.5.1 Kuantitas Penduduk	
			400.12.5.2 Kualitas Penduduk	
			400.12.5.3 Mobilitas Penduduk	
			400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	
			400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	
		400.12.6	Penyerasian Kependudukan	
			400.12.6.1 Indikator Kependudukan	
			400.12.6.2 Proyeksi Penduduk	
			400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan	
			400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	
			400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	
400.1: KELUARGA BERENCANA				
		400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data	
			400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan	
		400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
			400.13.3.1 Penyiapan fasilitas	
			400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan	
		400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	
			400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk	
			400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	
		400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
			400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter	
			400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter	
		400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
			400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi	
			400.13.6.2 Pemanfaatan parameter	
		400.13.7	Pengembangan Sistem	
			400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	
			400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
		400.13.8	Pengembangan Materi	
			400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	
			400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
		400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
			400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	
			400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	
		400.13.10	Analisis Sosial	
		400.13.11	Analisis Ekonomi	
		400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
		400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
		400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
		400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
		400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
			400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.17			Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
	400.13.18			Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
	400.13.19			Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.20			Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
			400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.21			Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.22			Kesertaan keluarga berencana pria
			400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
			400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
	400.13.23			Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
	400.13.24			Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
	400.13.25			Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
	400.13.26			Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
	400.13.27			Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.28			Pelebagaan bina ketahanan remaja
			400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
			400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
	400.13.29			Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
			400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
			400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
	400.13.30			Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
			400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
	400.13.31			Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32			Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.33			Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
	400.13.34			Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
	400.13.35			Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.36			Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
	400.13.37			Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38			Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39			Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.40			Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.41			Advokasi dan pencitraan
	400.13.42			Komunikasi, Informasi dan Edukasi
			400.13.42.1	Promosi
			400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
			400.13.42.3	Produk media komunikasi
	400.13.43			Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
	400.13.44			Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.45			Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.46			Tenaga Lini Lapangan
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
	400.13.47			Institusi Masyarakat Kelurahan
			400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat Kelurahan
			400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat Kelurahan
	400.13.48			Mekanisme Operasional lini lapangan
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.49			Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.50			Pengumpulan dan pengolahan data
	400.13.51			Analisis dan evaluasi
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	400.13.52			Sistem aplikasi dan bank data
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data
	400.13.53			Infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.54			Dokumentasi dan penyebaran informasi
			400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.1 HUBUNGAN MASYARAKAT				
	400.14.1			Keprotokolan
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
	400.14.2			Daftar nama/alamat kantor /pejabat
	400.14.3			Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-
	400.14.4			Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
			400.14.4.1	Kliping koran
			400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
			400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
	400.14.5			Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
			400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda
			400.14.5.5	Forum Kehumasan
			400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
	400.14.6			Dengar pendapat/hearing DPRD
	400.14.7			Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
	400.14.8			Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
	400.14.9			Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
	400.14.10			Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
	400.14.11			Penghargaan/tanda kenang-kenangan
	400.14.12			Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
500 PEREKONOMIAN				
500.1 KETAHANAN PANGAN				
	500.1.1			Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
	500.1.2			Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
			500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
			500.1.2.2	Akses Pangan
			500.1.2.3	Kerawanan Pangan
	500.1.3			Distribusi dan Cadangan Pangan
			500.1.3.1	Distribusi Pangan
			500.1.3.2	Harga Pangan
			500.1.3.3	Cadangan Pangan
	500.1.4			Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
			500.1.4.1	Konsumsi Pangan
			500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
			500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
	500.1.5			Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
			500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
			500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan
	500.1.6			Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
	500.1.7			Bimbingan Teknis
	500.1.8			Evaluasi
500.2 PERDAGANGAN				
	500.2.1			Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	500.2.2			Perdagangan Dalam Negeri
		500.2.2.1		Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
		500.2.2.2		Bisa Usaha Jasa Perdagangan
		500.2.2.3		Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
		500.2.2.4		Informasi Perusahaan
		500.2.2.5		Pelaku Pasar
		500.2.2.6		Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
		500.2.2.7		Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
		500.2.2.8		Pengembangan Produk Lokal
		500.2.2.9		Pencitraan Produk Dalam Negeri
		500.2.2.10		Pengembangan Sarana Distribusi
		500.2.2.11		Pengelolaan Sarana Distribusi
		500.2.2.12		Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
		500.2.2.13		Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
		500.2.2.14		Informasi Pasar
		500.2.2.15		Informasi Hasil Industri
		500.2.2.16		Barang Strategis
		500.2.2.17		Bahan Pokok Agro
	500.2.3			Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		500.2.3.1		Kelembagaan dan informasi standar
		500.2.3.2		Kerjasama Standarisasi
		500.2.3.3		Perumusan dan penerapan standar
		500.2.3.4		Tata usaha
		500.2.3.5		Kerjasama, informasi, dan publikasi
		500.2.3.6		Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
		500.2.3.7		Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
		500.2.3.8		Fasilitas kelembagaan
		500.2.3.9		Produk pertambangan dan aneka industri
		500.2.3.10		Produk pertanian, kimia dan kehutanan
		500.2.3.11		Jasa
		500.2.3.12		Kerjasama
		500.2.3.13		Sarana dan Kerjasama
		500.2.3.14		Kelembagaan dan dan penilaian
		500.2.3.15		UTTP dan Standar Ukuran
		500.2.3.16		Pengawasan
		500.2.3.17		Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
		500.2.3.18		Balai Pengujian UTTP
	500.2.4			Perdagangan Berjangka Komoditi
		500.2.4.1		Pengkajian pasar
		500.2.4.2		Pengawasan Transaksi
		500.2.4.3		Pengawasan Keuangan dan Audit
		500.2.4.4		Pengkajian pasar
		500.2.4.5		Pengembangan Pasar
		500.2.4.6		Sistem informasi
		500.2.4.7		Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
		500.2.4.8		Pengawasan pasar lelang
		500.2.4.9		Pengawasan sistem gudang
	500.2.5			Bimbingan Teknis
	500.2.6			Evaluasi
				500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	500.3.1			Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.3.2			Kelembagaan Koperasi dan UKM
		500.3.2.1		Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
		500.3.2.2		Tata Laksana Koperasi dan UKM
		500.3.2.3		Keanggotaan Koperasi
		500.3.2.4		Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3			Produksi
		500.3.3.1		Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		500.3.3.2		Kehutanan dan Perkebunan
		500.3.3.3		Perikanan dan Peternakan
		500.3.3.4		Industri Kerajinan dan Pertambangan
		500.3.3.5		Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4			Pembiayaan
		500.3.4.1		Program Pendanaan
		500.3.4.2		Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
		500.3.4.3		Urusan Permodalan
		500.3.4.4		Asuransi dan Jasa Keuangan
		500.3.4.5		Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
		500.3.4.6		Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
	500.3.5			Pemasaran dan Jaringan Usaha
		500.3.5.1		Perdagangan Dalam Negeri
		500.3.5.2		Ekspor dan Impor
		500.3.5.3		Sarana dan Prasarana Pemasaran
		500.3.5.4		Kemitraan dan Jaringan Usaha
		500.3.5.5		Informasi dan Publikasi Bisnis
		500.3.5.6		Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	
		500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	
		500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	
		500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	
		500.3.6.5	Advokasi	
		500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	
		500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	
		500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	
		500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	
		500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	
		500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
		500.3.8.1	Penelitian Koperasi	
		500.3.8.2	Penelitian UKM	
		500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	
		500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	
		500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
		500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
		500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	
		500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	
		500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	
500.4 KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		500.4.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.4.2	Perikanan Tangkap	
		500.4.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	
		500.4.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	
		500.4.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	
		500.4.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	
		500.4.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	
		500.4.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	
		500.4.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	
		500.4.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	
		500.4.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	
		500.4.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	
		500.4.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	
		500.4.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan	
		500.4.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	
		500.4.2.14	Kenelayanan	
		500.4.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	
		500.4.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	
		500.4.3	Perikanan Budidaya	
		500.4.3.1	Potensi Lahan dan Air	
		500.4.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	
		500.4.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	
		500.4.3.4	Perbenihan Skala Kecil	
		500.4.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan	
		500.4.3.6	Budidaya Air Tawar	
		500.4.3.7	Budidaya Ikan Hias	
		500.4.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	
		500.4.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	
		500.4.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	
		500.4.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	
		500.4.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	
		500.4.3.13	Kewirausahaan Budidaya	
		500.4.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	
		500.4.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan	
		500.4.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	
		500.4.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		500.4.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	
		500.4.4.2	Pengembangan Produk	
		500.4.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
		500.4.4.4	Industri Pengolahan	
		500.4.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	
		500.4.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	
		500.4.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	
		500.4.4.8	Pengembangan Industri	
		500.4.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	
		500.4.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	
		500.4.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	
		500.4.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	
		500.4.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	
		500.4.4.17	Pengembangan Ekspor	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.4.4.18	Pengembangan Impor
			500.4.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
			500.4.4.20	Pelayanan Usaha
			500.4.4.21	Kemitraan Usaha
			500.4.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
			500.4.4.23	Investasi dan Permodalan
			500.4.4.24	Informasi dan Promosi
	500.4.5			Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
			500.4.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
			500.4.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
			500.4.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
			500.4.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
			500.4.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
			500.4.5.6	Konservasi Wawasan
			500.4.5.7	Konservasi Jenis Ikan
			500.4.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
			500.4.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
			500.4.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
			500.4.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
			500.4.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
			500.4.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
			500.4.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
			500.4.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
			500.4.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
			500.4.5.17	Akses Permodalan
			500.4.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
			500.4.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
			500.4.5.20	Pengembangan Usaha
	500.4.6			Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			500.4.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
			500.4.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
			500.4.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
			500.4.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
			500.4.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
			500.4.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
			500.4.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
			500.4.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
			500.4.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
			500.4.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
			500.4.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
			500.4.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
			500.4.6.13	Sistem Pemantauan
			500.4.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
			500.4.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
			500.4.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
			500.4.6.17	Penyidikan
			500.4.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
			500.4.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
			500.4.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.4.7			Karantina Ikan
			500.4.7.1	Pemeriksaan Ikan
			500.4.7.2	Penahanan
			500.4.7.3	Pengasingan
			500.4.7.4	Pengamatan
			500.4.7.5	Pengakuan
			500.4.7.6	Penolakan
			500.4.7.7	Pemusnahan
			500.4.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
			500.4.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
			500.4.7.10	Permohonan Sertifikat
			500.4.7.11	Pemasukan Formulir
			500.4.7.12	Pemasukan Sertifikat
			500.4.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
			500.4.7.14	Surat Perintah
			500.4.7.15	Rekomendasi
			500.4.7.16	Penutupan Suatu Area
			500.4.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
			500.4.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
			500.4.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
			500.4.7.20	Instalasi Karantina Sementara
			500.4.7.21	Lokasi Karantina
500.5 PERTANIAN				
	500.5.1			Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2			Perlindungan hortikultura
			500.5.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
			500.5.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.5.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	
		500.5.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	
	500.5.3		Perbenihan Hortikultura	
		500.5.3.1	Penilaian Varietas	
		500.5.3.2	Pengawasan Mutu Benih	
		500.5.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	
	500.5.4		Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
		500.5.4.1	Basis Data Lahan	
		500.5.4.2	Pengendalian Lahan	
		500.5.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	
		500.5.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	
		500.5.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	
	500.5.5		Pengelolaan Air Irigasi	
		500.5.5.1	Pengembangan Sumber Air	
		500.5.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	
		500.5.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	
		500.5.5.4	Kelembagaan	
	500.5.6		Pembiayaan Pertanian	
		500.5.6.1	Pembiayaan Program	
		500.5.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	
		500.5.6.3	Pembiayaan agribisnis	
		500.5.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	
	500.5.7		Pupuk Pestisida	
		500.5.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	
		500.5.7.2	Pupuk Anorganik	
		500.5.7.3	Pestisida	
		500.5.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	
	500.5.8		Alat dan Mesin Pertanian	
		500.5.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	
		500.5.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	
		500.5.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	
	500.5.9		Perbenihan Tanaman Pangan	
		500.5.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	
		500.5.9.2	Produksi Benih Serealia	
		500.5.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	
		500.5.9.4	Kelembagaan Benih	
	500.5.10		Budidaya Serealia	
		500.5.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	
		500.5.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	
		500.5.10.3	Jagung	
		500.5.10.4	Serealia Lain	
	500.5.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
		500.5.11.1	Kedelai	
		500.5.11.2	Ubi Kayu	
		500.5.11.3	Aneka Kacang	
		500.5.11.4	Aneka Umbi	
	500.5.12		Tanaman Pangan	
		500.5.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	
		500.5.12.2	Dampak Perubahan Iklim	
		500.5.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	
		500.5.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	
	500.5.13		Pascapanen Tanaman Pangan	
		500.5.13.1	Padi	
		500.5.13.2	Jagung dan Serealia lain	
		500.5.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	
		500.5.13.4	Aneka Umbi	
	500.5.14		Pengolahan Hasil Pertanian	
		500.5.14.1	Tanaman Pangan	
		500.5.14.2	Hortikultura	
		500.5.14.3	Perkebunan	
		500.5.14.4	Peternakan	
	500.5.15		Mutu dan Standarisasi	
		500.5.15.1	Standardisasi	
		500.5.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	
		500.5.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	
		500.5.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	
	500.5.16		Pengembangan Usaha dan Investasi	
		500.5.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	
		500.5.16.2	Investasi	
		500.5.16.3	Promosi Dalam Negeri	
		500.5.16.4	Promosi Luar Negeri	
	500.5.17		Pemasaran Domestik	
		500.5.17.1	Informasi Pasar	
		500.5.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	
		500.5.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	
		500.5.17.4	Jaringan Pemasaran	
	500.5.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal,	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
	500.5.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		
		500.5.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	
		500.5.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	
	500.5.20	Diseminasi		
	500.5.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian		
		500.5.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demplot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	
		500.5.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	
	500.5.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		
	500.5.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan		
	500.5.24	Data Penelitian dan Pengembangan		
	500.5.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan		
	500.5.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		
		500.5.26.1	Hak Cipta	
		500.5.26.2	Hak Paten Sederhana	
		500.5.26.3	Hak Paten Biasa	
		500.5.26.4	Hak Merek	
		500.5.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	
		500.5.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	
		500.5.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	
	500.5.27	Pelayanan Perijinan Pertanian		
		500.5.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	
		500.5.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis	
		500.5.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis	
	500.5.28	Pelayanan Hukum		
		500.5.28.1	Sertifikasi	
		500.5.28.2	Pertimbangan Hukum	
	500.5.29	Karantina Pertanian		
		500.5.29.1	Karantina Tumbuhan	
		500.5.29.2	Karantina Hewan	
	500.5.30	Bimbingan Teknis		
	500.5.31	Evaluasi		
500.6 PETERNAKAN				
	500.6.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.6.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan		
		500.6.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non	
		500.6.2.2	Pakan Ternak	
		500.6.2.3	Budidaya Ternak	
		500.6.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan	
		500.6.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi,	
	500.6.3	Bimbingan Teknis		
	500.6.4	Evaluasi		
500.7 PERKEBUNAN				
	500.7.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.7.2	Tanaman Semusim		
		500.7.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	
		500.7.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	
		500.7.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	
		500.7.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	
	500.7.3	Tanaman Rempah & Penyegar		
		500.7.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	
		500.7.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.7.4	Tanaman Tahunan		
		500.7.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	
		500.7.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	
		500.7.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	
		500.7.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	
	500.7.5	Perlindungan Perkebunan		
		500.7.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim,	
		500.7.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan	
		500.7.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	
		500.7.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	
	500.7.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha		
		500.7.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	
		500.7.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	
		500.7.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	
		500.7.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	
	500.7.7	Bimbingan Teknis Perkebunan		
	500.7.8	Evaluasi Perkebunan		
500.8 PERINDUSTRIAN				
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.8.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama		
		500.8.2.1	Industri Manufaktur	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.8.2.2	Industri Agro	
		500.8.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.8.2.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.8.3	Promosi Industri		
		500.8.3.1	Industri Manufaktur	
		500.8.3.2	Promosi Industri Agro	
		500.8.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.8.3.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.8.4	Standarisasi dan Teknologi		
		500.8.4.1	Industri Manufaktur	
		500.8.4.2	Industri Agro	
		500.8.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.8.4.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.8.5	Hak atas Kekayaan Intelektual		
		500.8.5.1	Industri Manufaktur	
		500.8.5.2	Industri Agro	
		500.8.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.8.5.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.8.6	Industri Hijau		
		500.8.6.1	Industri Manufaktur	
		500.8.6.2	Industri Agro	
		500.8.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		500.8.6.4	Industri Kecil dan Menengah	
	500.8.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota		
	500.8.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		
	500.8.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		
	500.8.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		
	500.8.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		
	500.8.12	Standarisasi		
		500.8.12.1	Standar	
		500.8.12.2	Penyiapan Penerapan	
		500.8.12.3	Infrastruktur Standar	
	500.8.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri		
		500.8.13.1	Kebijakan Industri	
		500.8.13.2	Perpajakan dan Tarif	
		500.8.13.3	Pengembangan Model Industrial	
	500.8.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup		
		500.8.14.1	Industri Hijau	
		500.8.14.2	Lingkungan Hidup	
		500.8.14.3	Energi	
	500.8.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual		
		500.8.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	
		500.8.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	
		500.8.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.8.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		
500.9 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	500.9.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.9.2	Rekomendasi Kegeologian		
		500.9.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	
		500.9.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
		500.9.2.3	Pertambangan	
		500.9.2.4	Panas Bumi	
		500.9.2.5	Geosains	
		500.9.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	
		500.9.2.7	Kelayakan Lingkungan	
	500.9.3	Penelitian Kegeologian		
		500.9.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	
		500.9.3.2	Administrasi tenaga penelitian	
		500.9.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	
		500.9.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	
		500.9.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	
		500.9.3.6	Sumber Daya Geologi	
		500.9.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
		500.9.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	
		500.9.3.9	Survei Geologi	
	500.9.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian		
		500.9.4.1	Sumber Daya Geologi	
		500.9.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	
		500.9.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
		500.9.4.4	Survei Geologi	
		500.9.4.5	Konservasi	
	500.9.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi		
		500.9.5.1	Peta potensi dan sebaran	
		500.9.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	
		500.9.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan	
		500.9.5.4	Survei Geologi	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
500.9.6				Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500.9.6.1				Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
500.9.6.2				Rencana dan Realisasi Investasi
500.9.6.3				Penetapan Harga Minyak Mentah
500.9.6.4				Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
500.9.6.5				Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.9.6.6				Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
500.9.6.7				Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
500.9.6.8				Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.9.7				Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.9.7.1				Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non
500.9.7.2				Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi
500.9.7.3				Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi
500.9.7.4				Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
500.9.7.5				Perpanjangan Kontrak KKS
500.9.7.6				Penetapan Alokasi dan Harga Gas
500.9.7.7				Partisipasi Interest
500.9.7.8				Tumpang Tindih Lahan
500.9.8				Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
500.9.8.1				Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan,
500.9.8.2				Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
500.9.8.3				Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.9.9				Teknik dan Lingkungan
500.9.9.1				Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar
500.9.9.2				Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil
500.9.9.3				Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
500.9.9.4				Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
500.9.9.5				Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian
500.9.9.6				Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian
500.9.9.7				Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
500.9.9.8				Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir
500.9.9.9				Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan,
500.9.9.10				Usaha penunjang
500.9.10				Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.9.10.1				Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.9.10.2				Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.9.10.3				Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.9.10.4				Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.9.11				Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
500.9.11.1				Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
500.9.11.2				Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.9.11.3				Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
500.9.11.4				Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
500.9.11.5				Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
500.9.11.6				Penyusunan Neraca Energi
500.9.11.7				Road Map di Bidang EBT
500.9.12				Panas Bumi
500.9.12.1				Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
500.9.12.2				Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
500.9.12.3				Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
500.9.12.4				Rekomendasi Bahan Peledak
500.9.12.5				Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
500.9.12.6				Izin Tangki Bahan Bakar Cair
500.9.12.7				Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Prosedure Qualification
500.9.12.8				Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
500.9.12.9				Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
500.9.12.10				Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
500.9.12.11				Penetapan kapasitas usaha panas bumi
500.9.12.12				Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
500.9.12.13				Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
500.9.12.14				Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
500.9.12.15				Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
500.9.12.16				Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada
500.9.12.17				Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.9.13				Bioenergi
500.9.13.1				Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
500.9.13.2				Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
500.9.13.3				Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
500.9.13.4				Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
500.9.13.5				Evaluasi/Revisi HIP BBN
500.9.13.6				Database Pengusahaan Bioenergi
500.9.13.7				Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit
500.9.13.8				Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
500.9.13.9				Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.9.14				Aneka Energi
500.9.14.1				Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
500.9.14.2				Penetapan Kapasitas Usaha

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.9.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
		500.9.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	
		500.9.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	
	500.9.15		Konservasi Energi	
		500.9.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	
		500.9.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	
		500.9.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000	
		500.9.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	
		500.9.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	
		500.9.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	
		500.9.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	
		500.9.15.8	Profil investasi efisiensi energi	
		500.9.15.9	Investment Grade Audit (IGA)	
		500.9.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	
	500.9.16		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
		500.9.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	
		500.9.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
		500.9.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	
		500.9.16.4	Evaluasi Program Kerja	
	500.9.17		Bina Program Tenaga Listrik	
		500.9.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar	
		500.9.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio	
		500.9.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	
	500.9.18		Bina Usaha Ketenagalistrikan	
		500.9.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik	
		500.9.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	
		500.9.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	
		500.9.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik,	
	500.9.19		Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
		500.9.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	
		500.9.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	
		500.9.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga	
		500.9.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi	
	500.9.20		Sertifikasi	
		500.9.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	
		500.9.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	
		500.9.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	
		500.9.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	
		500.9.20.5	Registrasi Sertifikasi	
	500.9.21		Akreditasi Ketenagalistrikan	
	500.9.22		Standarisasi Kompetensi	
	500.9.23		Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
		500.9.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	
		500.9.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	
		500.9.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	
		500.9.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	
	500.9.24		Standarisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
		500.9.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	
		500.9.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	
		500.9.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	
		500.9.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	
		500.9.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan	
	500.9.25		Bina Program Mineral dan Batubara	
		500.9.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	
		500.9.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara	
		500.9.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	
		500.9.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batubara	
		500.9.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	
		500.9.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui	
		500.9.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	
		500.9.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	
		500.9.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	
	500.9.26		Pembinaan Pengusahaan Mineral	
		500.9.26.1	Ketenagakerjaan	
		500.9.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	
		500.9.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	
		500.9.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	
		500.9.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	
		500.9.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan	
		500.9.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral	
		500.9.26.8	Kontrak Karya (KK)	
		500.9.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	
		500.9.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	
		500.9.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	
		500.9.26.12	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)	
		500.9.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	
		500.9.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.9.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
			500.9.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
			500.9.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
	500.9.27			Pembinaan Pengusahaan Batubara
			500.9.27.1	Ketenagakerjaan
			500.9.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
			500.9.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
			500.9.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
			500.9.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
			500.9.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan
			500.9.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
			500.9.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.9.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan
			500.9.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
			500.9.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya
			500.9.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
			500.9.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
			500.9.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan
			500.9.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
			500.9.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
			500.9.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
	500.9.28			Penerimaan Negara
			500.9.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
			500.9.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			500.9.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.9.29			Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
			500.9.29.1	Perumusan RSNi (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar
			500.9.29.2	Pengawasan Standardisasi
			500.9.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
			500.9.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan
			500.9.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan
			500.9.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
			500.9.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
			500.9.29.8	Rekomendasi bahan kimia
			500.9.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan
			500.9.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan
			500.9.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan,
			500.9.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
			500.9.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
			500.9.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
			500.9.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen
			500.9.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen
			500.9.29.17	Pengawasan Teknis
			500.9.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
			500.9.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi
	500.9.30			Program Penelitian dan Pengembangan
			500.9.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
			500.9.30.2	Pengembangan dan inovasi
			500.9.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/
			500.9.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
			500.9.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.9.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan
			500.9.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan
			500.9.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
			500.9.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
			500.9.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
			500.9.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			500.9.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
			500.9.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
	500.9.31			Sarana Litbang
			500.9.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
			500.9.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
	500.9.32			Afiliasi
			500.9.32.1	Proyek Percontohan
			500.9.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
			500.9.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
			500.9.32.4	Penyajian Informasi
	500.9.33			Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
			500.9.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
			500.9.33.2	Energi Kelautan dan Wilayah Penelitian Energi dan wilayah pantai
			500.9.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
			500.9.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
	500.9.34			Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
			500.9.34.1	Teknologi Eksplorasi
			500.9.34.2	Teknologi Eksploitasi
			500.9.34.3	Laboratorium
			500.9.34.4	Study

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.9.34.5	Teknologi Proses	
		500.9.34.6	Teknologi Aplikasi Produk	
		500.9.34.7	Teknologi Gas	
	500.9.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara		
		500.9.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	
		500.9.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	
		500.9.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara	
	500.9.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan		
		500.9.36.1	Energi baru terbarukan	
		500.9.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	
		500.9.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	
		500.9.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan	
500.10 PERHUBUNGAN				
	500.10.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
	500.10.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan		
		500.10.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	
		500.10.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	
		500.10.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	
		500.10.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	
		500.10.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	
		500.10.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	
		500.10.2.7	Penetapan kelas jalan primer	
		500.10.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	
		500.10.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	
	500.10.3	Pengembangan Transportasi Jalan		
		500.10.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	
		500.10.3.2	Pengembangan transportasi jalan	
	500.10.4	Penguujian Kendaraan Bermotor		
		500.10.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	
		500.10.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	
		500.10.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	
		500.10.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	
	500.10.5	Teknologi Kendaraan Bermotor		
		500.10.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	
		500.10.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	
		500.10.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	
		500.10.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	
	500.10.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
		500.10.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	
		500.10.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	
	500.10.7	Perlengkapan Jalan		
		500.10.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	
		500.10.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	
		500.10.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	
		500.10.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	
		500.10.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	
	500.10.8	Angkutan Penumpang		
		500.10.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	
		500.10.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	
		500.10.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	
		500.10.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah	
		500.10.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	
		500.10.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	
		500.10.8.7	Angkutan perintis	
		500.10.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	
	500.10.9	Angkutan Barang		
		500.10.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	
		500.10.9.2	Tarif angkutan barang	
		500.10.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	
		500.10.9.4	Pembinaan angkutan barang	
		500.10.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	
	500.10.10	Monitoring Operasional		
		500.10.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
		500.10.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional	
		500.10.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	
	500.10.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
		500.10.11.1	Pedoman Teknis	
		500.10.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		500.10.11.3	Bimtek PPNS	
		500.10.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	500.10.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan		
		500.10.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	
		500.10.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	
	500.10.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan		
		500.10.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta	
		500.10.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.10.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		500.10.15		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		500.10.15.1		Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.15.2		Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
		500.10.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.10.16.1		Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.16.2		Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
		500.10.16.3		Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.10.16.4		Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan
		500.10.17		Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.10.18.1		Manajemen lalu lintas
		500.10.18.2		Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.18.3		Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
		500.10.18.4		Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan
		500.10.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.10.19.1		Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
		500.10.19.2		Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
		500.10.19.3		Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		500.10.20.1		Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.20.2		Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
		500.10.21		Tarif dan Keperintisan
		500.10.21.1		Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan
		500.10.21.2		Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
		500.10.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan
		500.10.22.1		Jaringan Transportasi Perkotaan
		500.10.22.2		Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
		500.10.22.3		Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi
		500.10.23		Lalu Lintas Perkotaan
		500.10.23.1		Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
		500.10.23.2		Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.10.23.3		Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
		500.10.24		Angkutan Perkotaan
		500.10.24.1		Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
		500.10.24.2		Jaringan trayek perkotaan
		500.10.24.3		Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah
		500.10.25		Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
		500.10.25.1		Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau
		500.10.25.2		Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara,
		500.10.25.3		Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang
		500.10.26		Dampak Transportasi Perkotaan
		500.10.26.1		Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
		500.10.26.2		Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
		500.10.26.3		Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
		500.10.26.4		Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
		500.10.26.5		Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
		500.10.26.6		Masterplan transportasi perkotaan
		500.10.27		Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
		500.10.27.1		Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
		500.10.27.2		Kualifikasi unit pengkajian
		500.10.27.3		Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
		500.10.28		Pengembangan Keselamatan
		500.10.28.1		Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
		500.10.28.2		Harmonisasi kebijakan
		500.10.29		Promosi dan Kemitraan Keselamatan
		500.10.29.1		Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan
		500.10.29.2		Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan
		500.10.30		Bina Keselamatan Angkutan Umum
		500.10.30.1		Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
		500.10.30.2		Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
		500.10.31		Audit Keselamatan
		500.10.31.1		Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
		500.10.31.2		Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan
		500.10.31.3		Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
		500.10.32		Inspeksi Keselamatan
		500.10.32.1		Pedoman keselamatan
		500.10.32.2		Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan
		500.10.32.3		Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
		500.10.33		Parkir
		500.10.33.1		Surat Tugas Juru Parkir
		500.10.33.2		Izin tempat khusus parkir swasta
		500.10.33.3		Surat Tugas TKP Pemerintah
500.1 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
		500.11.1		Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.11.2		Telekomunikasi

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.11.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	
		500.11.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	
		500.11.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	
		500.11.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	
	500.11.3		Penyiaran	
		500.11.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
		500.11.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
	500.11.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
		500.11.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	
		500.11.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	
		500.11.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	
		500.11.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	
		500.11.4.5	Pengembangan Infrastruktur	
	500.11.5		Pengendalian Informatika	
		500.11.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	
		500.11.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	
		500.11.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	
		500.11.5.4	Pencegahan dan Penertiban	
	500.11.6		e- Government	
		500.11.6.1	Tata Kelola e-Government	
		500.11.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	
		500.11.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government	
		500.11.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	
		500.11.6.5	Aplikasi Layanan Publik	
	500.11.7		e- Business	
		500.11.7.1	Tata Kelola e-Business	
		500.11.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	
		500.11.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business	
		500.11.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	
	500.11.8		Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
		500.11.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	
		500.11.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Kelurahan	
	500.11.9		Pemberdayaan Industri Informatika	
		500.11.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	
		500.11.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	
		500.11.9.3	Industri Perangkat Lunak	
		500.11.9.4	Industri Konten Multimedia	
	500.11.10		Keamanan Informasi	
		500.11.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	
		500.11.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	
		500.11.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	
		500.11.10.4	Penyidikan dan Penindakan	
		500.11.10.5	Budaya Keamanan Informasi	
	500.11.11		Komunikasi Publik	
		500.11.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	
		500.11.11.2	Pengelolaan Opini Publik	
		500.11.11.3	Layanan Komunikasi Publik	
	500.11.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
		500.11.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	
		500.11.12.2	Informasi Perekonomian	
		500.11.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	
	500.11.13		Pengelolaan Media Publik	
		500.11.13.1	Media Cetak	
		500.11.13.2	Media Online	
		500.11.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	
	500.11.14		Kemitraan Komunikasi	
		500.11.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	
		500.11.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	
		500.11.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	
	500.11.15		Infrastruktur Informatika	
		500.11.15.1	Jaringan	
		500.11.15.2	Piranti Teknologi Informatika	
		500.11.15.3	Keamanan Informatika	
	500.11.16		Sistem dan Data	
		500.11.16.1	Portal dan Konten	
		500.11.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	
		500.11.16.3	Pengembangan Aplikasi	
	500.11.17		Pusat Kerjasama	
		500.11.17.1	Kerja Sama daerah	
		500.11.17.2	Kerja Sama Bilateral	
	500.11.18		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
		500.11.18.1	Pelayanan Informasi	
		500.11.18.2	Hubungan Masyarakat	
		500.11.18.3	Bimbingan Teknis	
	500.11.19		Evaluasi	

500.1: PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.12.1		Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.12.2		Pengembangan Destinasi Wisata
		500.12.2.1		Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
		500.12.2.2		Pengembangan Daya Tarik Wisata
		500.12.2.3		Industri Pariwisata
		500.12.2.4		Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		500.12.2.5		Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
		500.12.3		Pemasaran Pariwisata
		500.12.3.1		Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
		500.12.3.2		Promosi Pariwisata Luar Negeri
		500.12.3.3		Promosi Pariwisata Dalam Negeri
		500.12.3.4		Pencitraan Indonesia
		500.12.4		Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
		500.12.4.1		Pengembangan industri Perfilman
		500.12.4.2		Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.12.4.3		Pengembangan Seni Rupa
		500.12.5		Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
		500.12.5.1		Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.12.5.2		Desain dan Arsitektur
		500.12.5.3		Kerjasama dan Fasilitasi
		500.12.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.12.6.1		Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
		500.12.6.2		Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
		500.12.6.3		Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.12.6.4		Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.1: STATISTIK				
		500.13.1		Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.13.2		Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
		500.13.2.1		Perencanaan
		500.13.2.2		Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan
		500.13.2.3		Pelaksanaan Lapangan
		500.13.2.4		Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/
		500.13.2.5		Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
		500.13.2.6		Diseminasi hasil sensus
		500.13.3		Survei
		500.13.3.1		Perencanaan
		500.13.3.2		Persiapan
		500.13.3.3		Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data,
		500.13.3.4		Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/
		500.13.3.5		Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan,
		500.13.3.6		Diseminasi hasil Survei
		500.13.4		Konsolidasi Data Statistik
		500.13.4.1		Kompilasi Data
		500.13.4.2		Analisis data
		500.13.4.3		Penyusunan Publikasi
		500.13.5		Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
500.1: KETENAGAKERJAAN				
		500.14.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		500.14.2		Perencanaan Tenaga Kerja
		500.14.2.1		Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
		500.14.2.2		Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
		500.14.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi
		500.14.3.1		Penerapan Standar Kompetensi
		500.14.3.2		Pengembangan Standarisasi Kompetensi
		500.14.3.3		Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
		500.14.3.4		Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.14.3.5		Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
		500.14.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
		500.14.4.1		Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
		500.14.4.2		Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
		500.14.4.3		Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
		500.14.4.4		Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.14.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
		500.14.5.1		Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
		500.14.5.2		Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
		500.14.5.3		Tenaga Pelatihan
		500.14.5.4		Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
		500.14.6		Bina Pemagangan
		500.14.6.1		Pemagangan Dalam Negeri
		500.14.6.2		Pemagangan Luar Negeri
		500.14.6.3		Perizinan dan Advokasi Pemagangan
		500.14.6.4		Promosi dan Jenjang Pemagangan
		500.14.7		Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.14.7.1		Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
		500.14.7.2		Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			500.14.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
			500.14.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
		500.14.8		Pengembangan Pasar Kerja
			500.14.8.1	Informasi Pasar Kerja
			500.14.8.2	Analisis Pasar Kerja
			500.14.8.3	Bursa Kerja
			500.14.8.4	Analisis Jabatan
		500.14.9		Penempatan 'Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
			500.14.9.1	Antar Kerja
			500.14.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
			500.14.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
			500.14.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
		500.14.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
			500.14.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
			500.14.10.2	Pengembangan Padat Karya
			500.14.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
			500.14.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.14.11		Standardisasi Profesi
			500.14.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
			500.14.11.2	Pembakuan Akreditasi
		500.14.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
			500.14.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
			500.14.12.2	Perjanjian Kerja
			500.14.12.3	Kesejahteraan Pekerja
			500.14.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
		500.14.13		Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
			500.14.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
			500.14.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
			500.14.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
		500.14.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.14.14.1	Pengupahan
			500.14.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
		500.14.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
			500.14.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			500.14.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.14.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.14.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
			500.14.16.1	Pengawasan Norma Kerja
			500.14.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
			500.14.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
		500.14.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
			500.14.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
			500.14.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
			500.14.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
			500.14.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
		500.14.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			500.14.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
			500.14.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
			500.14.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
			500.14.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
			500.14.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
		500.14.19		Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
		500.14.20		Bina Penegakan Hukum
			500.14.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			500.14.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
			500.14.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.14.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
		500.14.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
			500.14.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
			500.14.21.2	Hasil kajian, perkerjasama dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
			500.14.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
			500.14.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
		500.14.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.14.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.1: PENANAMAN MODAL				
			500.15.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			500.15.2	Perencanaan Penanaman Modal
			500.15.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
			500.15.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
			500.15.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
			500.15.2.4	Perencanaan Infrastruktur

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.15.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		500.15.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	
		500.15.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	
		500.15.3.3	Pemberdayaan Usaha	
		500.15.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	
		500.15.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	
		500.15.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	
		500.15.4	Promosi Penanaman Modal	
		500.15.4.1	Pengembangan Promosi	
		500.15.4.2	Analisis Strategi Promosi	
		500.15.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	
		500.15.4.4	Promosi Sektoral	
		500.15.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	
		500.15.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	
		500.15.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
		500.15.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	
		500.15.5.2	Kerja Sama Regional	
		500.15.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	
		500.15.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		500.15.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	
		500.15.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	
		500.15.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	
		500.15.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	
		500.15.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	
		500.15.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	
		500.15.7	Pelayanan Penanaman Modal	
		500.15.7.1	Pelayanan Aplikasi	
		500.15.7.2	Pelayanan Perijinan	
		500.15.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	
		500.15.7.4	Pelayanan Non Perijinan	
		500.15.7.5	Pelayanan Fasilitas	
500.1' PERTANAHAN				
		500.16.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.16.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	
		500.16.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	
		500.16.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	
		500.16.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	
		500.16.2.4	Advokasi dan Pengendalian	
		500.16.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
		500.16.3.1	Penatagunaan Tanah	
		500.16.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	
		500.16.3.3	Penguatan Atas Tanah	
		500.16.4	Sengketa Tanah	
		500.16.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	
		500.16.4.2	Advokasi dan Pengendalian	
500.1' TRANSMIGRASI				
		500.17.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.17.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
		500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	
		500.17.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	
		500.17.2.3	Dokumentasi Pertanahan	
		500.17.2.4	Advokasi Pertanahan	
		500.17.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
		500.17.3.1	Penyiapan Lahan	
		500.17.3.2	Penyiapan Sarana	
		500.17.3.3	Penyiapan Prasarana	
		500.17.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	
		500.17.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
		500.17.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	
		500.17.4.2	Penyiapan Perpindahan	
		500.17.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	
		500.17.4.4	Penataan dan Adaptasi	
		500.17.5	Partisipasi Masyarakat	
		500.17.5.1	Promosi dan Motivasi	
		500.17.5.2	Kerjasama Kelembagaan	
		500.17.5.3	Kerjasama Antar Daerah	
		500.17.5.4	Pelayanan Investasi	
		500.17.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
		500.17.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	
		500.17.6.2	Bina Sistem Informasi	
		500.17.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	
		500.17.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	
		500.17.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	
		500.17.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
		500.17.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		500.17.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	
		500.17.7.3	Pengembangan Kelembagaan	
		500.17.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	
	500.17.8		Pengembangan Usaha	
		500.17.8.1	Kewirausahaan	
		500.17.8.2	Produksi	
		500.17.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	
		500.17.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	
	500.17.9		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
		500.17.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	
		500.17.9.2	Pengembangan Sarana	
		500.17.9.3	Pengembangan Prasarana	
		500.17.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	
	500.17.10		Penyerasian Lingkungan	
		500.17.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	
		500.17.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	
		500.17.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	
		500.17.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
600.1 PEKERJAAN UMUM				
	600.1.1		Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.1.2		Penatagunaan Sumber Daya Air	
		600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	
		600.1.2.2	Kelembagaan	
		600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	
		600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	
		600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	
	600.1.3		Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
		600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	
		600.1.3.2	Manajemen Mutu	
		600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	
		600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	
	600.1.4		Pengelolaan Sumber Daya Air	
		600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	
		600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	
		600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	
		600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	
	600.1.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
		600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	
		600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	
		600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	
		600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	
		600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	
	600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan	
		600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	
		600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	
		600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	
	600.1.8		Pembangunan Jalan	
		600.1.8.1	Standar dan Pedoman	
		600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	
		600.1.8.3	Pengelolaan Gedometri, Perkerasan, dan Drainage	
		600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	
	600.1.9		Preservasi Jalan	
		600.1.9.1	Standar dan Pedoman	
		600.1.9.2	Perencanaan Teknis	
		600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	
		600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	
	600.1.10		Pengelolaan Jembatan	
		600.1.10.1	Standar dan Pedoman	
		600.1.10.2	Perencanaan Teknis	
		600.1.10.3	Teknik Jembatan	
		600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	
	600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
		600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	
		600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	
		600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	
	600.1.12		Pengaturan Jalan Tol	
		600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol	
		600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	
		600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	
		600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol	
	600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
		600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	
		600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	
	600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman	
		600.1.14.1	Perencanaan Teknis	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	
		600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	
		600.1.14.5	Kelembagaan	
	600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan	
		600.1.15.1	Perencanaan Teknis	
		600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	
		600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	
		600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	
		600.1.15.5	Kelembagaan	
	600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		600.1.16.1	Perencanaan Teknis	
		600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	
		600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	
		600.1.16.5	Kelembagaan	
		600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	
		600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	
	600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
		600.1.17.1	Perencanaan Teknis	
		600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	
		600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	
		600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	
		600.1.17.5	Kelembagaan	
		600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	
	600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi	
600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
		600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	
		600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	
		600.2.2.3	Kemitraan	
	600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan	
		600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	
		600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	
		600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	
	600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
		600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	
		600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	
		600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	
		600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	
		600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	
	600.2.5		Perencanaan Penyediaan Perumahan	
		600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	
		600.2.5.2	Analisa Teknik	
		600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	
		600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	
	600.2.6		Penyediaan Rumah Susun	
		600.2.6.1	Perencanaan Teknik	
		600.2.6.2	Penyediaan	
		600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	
		600.2.6.4	Pengelolaan	
	600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus	
		600.2.7.1	Perencanaan Teknik	
		600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	
		600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	
		600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	
		600.2.7.5	Perencanaan Teknik	
		600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	
		600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	
	600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
		600.2.8.1	Perencanaan Teknik	
		600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	
		600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	
		600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	
	600.2.9		Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	
		600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	
	600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
		600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	
		600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	
		600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	
		600.2.10.4	Manajemen Mutu	
	600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
		600.2.11.1	Kelembagaan	
		600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	
		600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	
	600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
		600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	
		600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	
		600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	
		600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	
	600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
		600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	
		600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi	
		600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	
		600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	
	600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi	
		600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	
		600.2.15.2	Pengembangan Materi	
		600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	
	600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
		600.2.16.1	Antar Sektor	
		600.2.16.2	Antar Wilayah	
	600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis	
		600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	
		600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	
	600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan	
		600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	
		600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	
		600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	
		600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	
		600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	
	600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi	
600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)				
	600.3.1		Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	
	600.3.2		Perencanaan	
		600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	
		600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	
		600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	
		600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	
		600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kota	
		600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	
		600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Prasarana Kota	
	600.3.3		Pemanfaatan dan Pengendalian	
		600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	
		600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	
		600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	
	600.3.4		Pemetaan	
		600.3.4.1	Peta Dasar	
		600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	
		600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	
		600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	
600.4 LINGKUNGAN HIDUP				
	600.4.1		Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	600.4.2		Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
		600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	
		600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	
	600.4.3		Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
		600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	
		600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	
	600.4.4		Ekonomi Lingkungan	
	600.4.5		Dampak Lingkungan	
		600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	
		600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	
		600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	
	600.4.6		Pemantauan dan Pengawasan	
		600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	
		600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	
		600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	
		600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	
	600.4.7		Evaluasi dan Pengembangan	
		600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	
		600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	
		600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	
		600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	
	600.4.8		Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
		600.4.8.1	Pengembangan	
		600.4.8.2	Pemanfaatan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	
		600.4.8.4	Keamanan Hayati	
		600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	
	600.4.9		Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
		600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	
		600.4.9.2	Rawa	
	600.4.10		Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
		600.4.10.1	Perangkat mitigasi	
		600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	
		600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	
		600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	
	600.4.11		Adaptasi Perubahan Iklim	
		600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan	
		600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	
	600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
		600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	
		600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	
		600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	
	600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
		600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	
		600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	
		600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	
		600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	
	600.4.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
		600.4.14.1	Pemantauan	
		600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	
	600.4.15		Pengelolaan Sampah	
		600.4.15.1	Pembatasan sampah	
		600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	
		600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	
		600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	
	600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan	
		600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	
		600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	
	600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
		600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	
		600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	
	600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan	
		600.4.18.1	Penyidikan	
		600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	
		600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	
	600.4.19		Komunikasi Lingkungan	
		600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	
		600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	
	600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat	
		600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	
		600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	
	600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat	
		600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	
	600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
		600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	
		600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	
	600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan	
		600.4.23.1	Pengelolaan Data	
		600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	
		600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	
		600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	
	600.4.24		Kelembagaan Lingkungan	
		600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	
		600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	
	600.4.25		Standarisasi dan teknologi	
		600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	
		600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	
		600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	
	600.4.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
		600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	
		600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	
700 PENGAWASAN				
700.1 PENGAWASAN INTERNAL				
	700.1.1		Rencana Pengawasan	
		700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	
		700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	
		700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	
		700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	
		700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	
	700.1.2		Pelaksanaan Pengawasan	

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)
			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)
			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
			700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)
800 KEPEGAWAIAN				
800.1 SUMBER DAYA MANUSIA				
			800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
			800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana
			800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN,
			800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
			800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
			800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
			800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan
			800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan
			800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
			800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
			800.1.2.5	Pengangkatan ASN
			800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
			800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
			800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
			800.1.3	Mutasi Pegawai
			800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan,
			800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
			800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
			800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
			800.1.4	Pengembangan Karir
			800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di
			800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
			800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
			800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
			800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul
			800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara
			800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
			800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
			800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
			800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
			800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
			800.1.6.2	Disiplin
			800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
			800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
			800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
			800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan
			800.1.7	Bantuan Hukum
			800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai
				1 Status Kepegawaian
				2 Kedudukan Kepegawaian
				3 Keberatan Pegawai
				4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
			800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian
			800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
			800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
			800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
			800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
			800.1.10	Pengawasan dan pengendalian
			800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
			800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
			800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
			800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
			800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
			800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
			800.1.11	Administrasi Pegawai
			800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
			800.1.11.2	Cuti Sakit
			800.1.11.3	Cuti Bersalin
			800.1.11.4	Cuti Tahunan
			800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
			800.1.11.6	Cuti Besar
			800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
			800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
			800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
			800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
			800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
			800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
			800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
		800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
			800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
			800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
			800.1.12.3	Tabungan Perumahan
			800.1.12.4	Bantuan Sosial
			800.1.12.5	Pakaian Dinas
			800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
			800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
			800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
			800.1.12.10	Rekam Medis
		800.1.13		Administrasi Perseorangan
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
			800.1.13.4	Sekretaris Daerah
			800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
		800.1.14		Penilaian Kompetensi
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
		800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
		800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
			800.2.2.4	Modul-modul diklat
			800.2.2.5	Panduan fasilitator
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
		800.2.3		Widyaiswara
			800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
		800.2.4		Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
			800.2.4.5	Sistem informasi diklat
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
		800.2.5		Alumni
900 KEUANGAN				
900.1 KEUANGAN DAERAH				
		900.1.1		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
			900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
		900.1.2		Penyusunan Anggaran
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola
		900.1.3		Pelaksanaan Anggaran
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
			900.1.3.2	Pendapatan
			900.1.3.3	Belanja
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
			900.1.3.7	Daftar Gaji
			900.1.3.8	Kartu Gaji
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

KODE KLASIFIKASI				JENIS/SERIES ARSIP
P	SP	S	T	
		900.1.3.10		Laporan Keuangan
	900.1.4			Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.4.1		Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
		900.1.4.2		Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
		900.1.4.3		Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
		900.1.4.4		Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat)
		900.1.4.5		Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
		900.1.4.6		Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
		900.1.4.7		Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
		900.1.4.8		Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan)
		900.1.4.9		Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection
		900.1.4.10		Staff Appraisal Report
		900.1.4.11		Report /Laporan
		900.1.4.12		Laporan Hutang Daerah
		900.1.4.13		Completion Report/Annual Report
		900.1.4.14		Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.5			Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
	900.1.6			Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
		900.1.6.1		Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
		900.1.6.2		Dokumen Kebijakan Akuntansi
		900.1.6.3		Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
		900.1.6.4		Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
	900.1.7			Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
		900.1.7.1		Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran
		900.1.7.2		Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian
		900.1.7.3		Buku Rekening Bank
		900.1.7.4		Keputusan Pembukuan Rekening
		900.1.7.5		Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register
	900.1.8			Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
		900.1.8.1		Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau
		900.1.8.2		Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan
	900.1.9			Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan
	900.1.10			Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
		900.1.10.1		Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda
		900.1.10.2		Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan
		900.1.10.3		Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat,
		900.1.10.4		Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk
	900.1.11			Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
		900.1.11.1		Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan
		900.1.11.2		Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
		900.1.11.3		Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
		900.1.11.4		Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
	900.1.12			Anggaran Daerah
		900.1.12.1		Anggaran Daerah
		900.1.12.2		Dukungan Teknis Anggaran Daerah
	900.1.13			Pendapatan dan Investasi Daerah
		900.1.13.1		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi
		900.1.13.2		Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik
		900.1.13.3		Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta
		900.1.13.4		Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan
		900.1.13.5		Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah
	900.1.14			Fasilitasi Dana Perimbangan
		900.1.14.1		Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan
		900.1.14.2		Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan
		900.1.14.3		Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar
		900.1.14.4		Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana
		900.1.14.5		Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan
	900.1.15			Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		900.1.15.1		Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan
		900.1.15.2		Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta
		900.1.15.3		Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan
		900.1.15.4		Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan
		900.1.15.5		Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031